

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi DIY (<i>Month-to-Month</i>)						
YOGYAKARTA	TRIWULAN IV 2024			TRIWULAN I 2025		
	OKT (%)	OKT (%)	OKT (%)	JAN (%)	FEB (%)	MAR (%)
	0.09	0.09	0.09	-0.35	-0.86	1.25

Perkembangan Inflasi DIY (<i>Year on Year</i>)											
	JAN (%)	FEB(%)	MAR(%)	APR(%)	MEI(%)	JUN(%)	JUL(%)	AGS(%)	SPT(%)	OKT (%)	NOV DES (%)
2023	6.05	6.28	6.11	5.14	4.72	4.20	4.00	4.08	3.30	3.44	3.48 3.17
2024	2.60	2.75	2.95	2.87	2.28	2.35	2.16	2.33	1.85	1.57	1.14 1.28
2025	0.95	-0.30	0.52								

Inflasi antar wilayah cakupan IHK DIY						
Bulan	DIY		Kota Yogyakarta		Kabupaten Gunungkidul	
	MtM	YoY	MtM	YoY	MtM	YoY
Januari	-0.35	0.95	-0.35	1.30	-0.35	0.64
Februari	-0.86	-0.30	0.11	-0.85	-0.66	-0.86
Maret	1.25	0.52	1.29	0.83	1.24	0.28

Secara m-to-m Pada **bulan Januari 2025** DIY terjadi deflasi sebesar -0.35% (mtm). Kabupaten Gunungkidul dan kota Yogyakarta tercatat juga mengalami deflasi sebesar -0.35% (mtm). Berikut tabel komoditas penyumbang inflasi/deflasi bulan Oktober 2025 (m-to-m):

ANDIL INFLASI (m-to-m)		ANDIL DEFLASI (m-to-m)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Cabai merah	0.13	Tarif listrik	-1.25
Cabai rawit	0.12	Tarif kereta api	-0.02
wortel	0.05	Bawang merah	-0.01
Cabai hijau	0.05	ketimun	-0.01
Kontrak rumah	0.04	Angkutan antar kota	-0.01

Secara y-on-y Pada **bulan Januari 2025** DIY terjadi inflasi sebesar 0.95% (yoy). Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi sebesar 0.64% (yoy) dan Kota Yogyakarta tercatat mengalami inflasi sebesar 1.30% (yoy). Tabel penyumbang utama inflasi bulan Januari 2025 secara *year on year*:

ANDIL INFLASI (y-on-y)		ANDIL DEFLASI (y-on-y)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Emas perhiasan	0.37	Tarif listrik	-1.26
Kopi bubuk	0.18	Cabai merah	-0.05
Bahan bakar rumah tangga	0.08	beras	-0.05
Minyak goreng	0.07	Angkutan udara	-0.04
Cabai rawit	0.06	bensin	-0.04

Secara m-to-m Pada **bulan Februari 2025** DIY Kembali mengalami deflasi sebesar -0.86% (mtm). Kabupaten Gunungkidul juga tercatat mengalami deflasi sebesar -0.66% (mtm) dan Kota Yogyakarta tercatat mengalami deflasi sebesar -0.85% (mtm). Berikut tabel komoditas penyumbang inflasi/deflasi bulan Februari 2025 (m-to-m):

ANDIL INFLASI (m-to-m)		ANDIL DEFLASI (m-to-m)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Emas perhiasan	0.08	Tarif listrik	-1.05
Sigaret kretek mesin	0.05	Bawang merah	-0.04
Sigaret kretek tangan	0.05	Cabai merah	-0.04
bensin	0.03	Daging ayam ras	-0.02
Wortel	0.02	Kacang panjang	-0.02

Secara y-on-y Pada **bulan Februari 2024** DIY juga mengalami deflasi sebesar -0.30% (yoy). Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami deflasi sebesar -0.66% (yoy) dan Kota Yogyakarta tercatat mengalami inflasi sebesar 0.11% (yoy). Penyumbang utama inflasi bulan Februari 2025 secara *year on year*:

ANDIL INFLASI (y-on-y)		ANDIL DEFLASI (y-on-y)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Emas perhiasan	0.45	Tarif listrik	-2.32
Kopi bubuk	0.19	beras	-0.25
Sigaret kretek mesin	0.08	Cabai merah	-0.14
Bahan bakar rumah tangga	0.08	tomat	-0.04
Minyak goreng	0.08	Angkutan udara	-0.04

Secara m-to-m Pada **bulan Maret 2025** DIY terjadi inflasi sebesar 1.25% (mtm). Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi sebesar 1.24% (mtm) dan Kota Yogyakarta tercatat mengalami inflasi sebesar 1.29% (mtm). Berikut tabel komoditas penyumbang inflasi/deflasi bulan Maret 2025 (m-to-m):

ANDIL INFLASI (m-to-m)		ANDIL DEFLASI (m-to-m)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Tarif listrik	0.88	Buncis	-0.08
Bawang merah	0.07	Tomat	-0.03
Emas perhiasan	0.07	Kacang Panjang	-0.02
Cabai rawit	0.05	Angkutan udara	-0.01
beras	0.03	terong	-0.01

Secara y-on-y Pada **bulan Maret 2025** DIY terjadi inflasi sebesar 0.52% (yoy). Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi sebesar 0.28% (yoy) dan Kota Yogyakarta tercatat mengalami inflasi sebesar 0.83% (yoy). Penyumbang utama inflasi bulan Maret 2025 secara *year on year*:

ANDIL INFLASI (y-on-y)		ANDIL DEFLASI (y-on-y)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Emas perhiasan	0.48	Tarif listrik	-1.43
Kopi bubuk	0.20	Beras	-0.31

Cabai rawit	0.13	Tomat	-0.09
Sigaret kretek mesin	0.09	Daging ayam ras	-0.08
kelapa	0.09	buncis	-0.08

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Berlanjutnya kondisi ketidakpastian global yang berdampak pada tingginya potensi imported inflation
2. Penongkatan demand khususnya pada komoditas pangan sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
3. Penyesuaian harga jual industri barang-barang pokok dimana pada tahun sebelumnya pelaku usaha masih menahan kenaikan harga
4. Kenaikan harga BBM seiring volatilitas harga minyak dunia dan kondisi deisit APBN
5. Potensi risiko kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi dan disrupsi rantai pasok global seiring dengan kebijakan negara mitra dagang utama (Amerika Serikat)

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah baik pusat dan daerah, serta bank Indonesia melalui implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan membuat tekanan inflasi DIY tahun 2025 pada triwulan I terjaga dalam rentang target sasaran inflasi $2.5 \pm 1\%$. Mencermati perkembangan inflasi hingga Maret 2025 yang cenderung lebih rendah, TPID DIY telah dan akan melakukan beberapa upaya stabilisasi inflasi sesuai dengan roadmap TPID DIY melalui sinergi dan kolaborasi dalam koridor 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif), diantaranya:

1. Terus mendorong optimalisasi peran kios Segoro Amarto sebagai *price reference store* di DIY. Saat ini, terdapat 4 kios Segoro Amarto yang berada di pasar pantauan DIY.
2. Pemantauan harga dan pasokan langsung ke produsen, distributor, hingga pedagang ritel untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pada momentum HBKN Idul Fitri
3. Pelaksanaan komunikasi efektif melalui *press conference* hasil pemantauan HBKN Idul Fitri 1446 H.
4. Kick Of Meeting Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
5. Intensifikasi penyelenggaraan Operasi Pasar/Gelar Pangan Murah
6. Fasilitasi subsidi ongkos angkut komoditas pangan strategis dari distributor ke pedagang di pasar tradisional dan juga sewa kendaraan untuk pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen
7. Optimalisasi alokasi APBD dalam mendukung subsidi harga komoditas pangan utama
8. Membangun ketahanan pangan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan/lahan tidur menggunakan command center pertanahan dan tata ruang yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
9. Bekerjasama dengan Perum Bulog terkait pengelolaan pangan yang terintegrasi di Wilayah DIY untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan strategis milik pemerintah

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Neraca pangan DIY perlu dibangun secara detail dari masing-masing kab/kota se-DIY dan diinformasikan secara terbuka kepada seluruh anggota TPID. Data neraca pangan ini sangat diperlukan untuk mengklarifikasi dinamika harga dan yang terpenting menjadi dasar dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi ke depan serta mempermudah pemetaan kebutuhan KAD intraprovinci sebagaimana berita acara komitmen bersama masing-masing kepala daerah.
2. Pemanfaatan pasar lelang digital perlu diperluas dan mendorong pedagang lokal untuk turut berpartisipasi dalam proses lelang komoditas hortikultura untuk kemudian dapat memasarkan ke pasar lokal.
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah DIY eksisting beserta pemetaan penguatan dalam penyusunan peta jalan TPID ke Depan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan infrastruktur dan rantai pasok untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan
2. Penguatan data dan informasi melalui pengembangan Neraca pangan yang dapat diakses melalui <https://tpid.jogjaproprov.go.id>
3. Perlu dibentuk system logistic daerah
4. Gerakan sosial masyarakat terkait stabilitas harga perlu terus diperluas dan didukung
5. Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik antar provinsi maupun intra provinsi perlu terus diperkuat